

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Koran Jakarta |

Cetak Ulang KTP Butuh Anggaran Besar

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan cetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik warga saat Jakarta sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) membutuhkan anggaran besar.

"Saya belum pernah rapat soal ini, tapi dengan perpindahan ini otomatis. Kemungkinan nanti kita akan bahas secara teknis, karena memang membutuhkan anggaran yang besar," kata Joko dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Pemindehan Ibu Kota Negara (IKN) di DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Joko terus mempertimbangkan

usulan Dewan untuk mengalihkan KTP secara digital dan dikonsultasikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau dengan elektronik saya setuju juga. Coba kita konsultasikan ke Dirjen Dukcapil apa bisa digunakan KTP digital," ujar Joko.

Joko menjelaskan bahwa perubahan pada halaman KTP perlu dilakukan apabila Undang-Undang Kekhususan Jakarta telah disahkan. Secara otomatis, tulisan "Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" diganti menjadi "Daerah Khusus Jakarta".

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awal-

udin mengatakan, pihaknya siap melayani perubahan nama kota jika DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ.

"Terkait cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," kata Budi.

Namun perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar



Joko Agus Setyono

ANTARA/SITI NUHHALIZA

berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya.

Pemborosan

Anggota DPRD DKI William A Sarana menilai mencek ulang KTP Elektronik untuk mengubah data warga dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi DKJ merupakan pemborosan anggaran. "Hal itu merupakan ajang pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas," kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

William menolak adanya pencetakan ulang KTP lantaran bisa menghabiskan anggaran terutama blanko sebagai bahan dasar pencetakan KTP serta mengingat jumlah lebih dari 11 juta orang di Jakarta.

Selain pemborosan, tentunya upaya ini akan menyulitkan dan merepotkan warga di DKI Jakarta yang harus ke kelurahan untuk mengurus kewalihan untuk melayaninya.

"Kelurahan akan kesulitan bahkan kewalihan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di KTP," katanya.

Dia mengimbau lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja sehingga tidak perlu dalam bentuk fisik KTP elektronik. "Untuk pemilik KTP elektronik baru saja mungkin yang perlu diubah fisik kartunya untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ," katanya. ■ Ant/S-2